

PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN PADA BERBAGAI TIPE AGROEKOSISTEM

Sri Hery Susilowati

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses berkelanjutan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis. Pembangunan dapat mengakibatkan perubahan struktur ekonomi perdesaan menyangkut seluruh aspek termasuk perubahan penguasaan lahan pertanian. Penguasaan lahan pertanian merupakan substansi yang sangat strategis dan kompleks. Aspek-aspek yang tercakup dalam permasalahan penguasaan lahan pertanian ini tidak hanya mencakup dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial budaya.

Perubahan luas penguasaan lahan petani dapat berimplikasi pada perubahan sistem produksi pertanian. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan nonpertanian, seperti industri, pemukiman, jalan tol, dan sebagainya juga dapat mendorong alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan bukan pertanian dan dalam jangka pendek akan mendorong terjadinya pengangguran karena aset yang dimiliki oleh rumah tangga tani telah terjual (Nuhung, 2015). Di sisi lain, ketersediaan lahan yang sesuai untuk dijadikan lahan sawah juga semakin sulit dijumpai, walaupun ada membutuhkan investasi yang sangat mahal (Rachmat dan Muslim, 2013). Menurut Suherman dan Suratno (2014), efektivitas pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi ke penggunaan nonpertanian sangat tergantung pada kejelasan dan kebijakan penataan ruang. Sistem pewarisan juga berkontribusi terhadap sempitnya penguasaan lahan melalui proses fragmentasi lahan. Hasil survei tingkat mikro (Susilowati *et al.*, 2012) menunjukkan bahwa pewarisan lahan merupakan sumber perolehan lahan yang paling umum terjadi.

Selama ini pemerintah telah menciptakan berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengondisikan agar luas penguasaan lahan dan struktur penguasaan lahan pertanian lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Perluasan lahan pertanian baru, transmigrasi, reforma agraria, dan sebagainya telah ditempuh. Akan tetapi, luas penguasaan lahan petani tetap relatif sempit akibat berbagai faktor, antara lain karena meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja nonpertanian, konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang cenderung meningkat, fragmentasi lahan yang disebabkan oleh sistem pewarisan yang secara tradisional tetap berlangsung, dan meningkatnya jumlah rumah tangga petani baru.

Dalam jangka panjang upaya untuk meningkatkan akses lahan, khususnya bagi petani berlahan sempit, harus diintensifkan, di antaranya melalui pembukaan lahan baru dan implementasi reforma lahan (Sudaryanto *et al.*, 2009). Susilowati, *et al.* (2012) dan Purwoto *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa lahan merupakan penyumbang utama pendapatan rumah tangga petani. Namun, karena penguasaan lahan petani yang sempit maka pendapatan dari lahan semakin tidak dapat

diandalkan. Dalam kaitan ini maka program *land reform* merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian di tengah sempitnya pemilikan lahan oleh petani di perdesaan. Program ini meliputi redistribusi hak-hak pemilikan lahan dan pembebasan penggunaan lahan yang terlalu luas oleh para tuan tanah dan membagikannya kepada para petani kecil yang lahannya terlalu sempit (Budiantoro, 2013 dalam Swastika, 2014).

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perubahan penguasaan lahan pertanian rumah tangga tani pada berbagai tipe agroekosistem, utamanya yang terkait dengan struktur penguasaan dan pemilikan lahan, distribusi penguasaan lahan, dan status penguasaan lahan pertanian. Informasi tersebut diperlukan guna menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan penguasaan lahan pertanian, khususnya oleh petani berlahan sempit yang merupakan sebagian besar petani Indonesia.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran

Pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan berdampak pada perubahan struktur ekonomi perdesaan. Persaingan penggunaan lahan untuk pertanian dan nonpertanian terus terjadi seiring dengan proses transformasi ekonomi menuju industrialisasi pertanian yang dicerminkan melalui proses alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang terus terjadi. Dampak lebih lanjut adalah perubahan struktur penguasaan lahan yang lebih lanjut akan memengaruhi sistem produksi dan lebih lanjut lagi adalah berpengaruh pada kesejahteraan petani.

Proses pembangunan yang terus berlanjut yang berdampak pada perubahan struktur penguasaan lahan, penting untuk dikaji dari aspek (1) perubahan struktur penguasaan dan pemilikan lahan, yang meliputi struktur lahan milik sendiri dan lahan bukan milik; (2) struktur penguasaan lahan dilihat dari status penguasaan yang bisa berasal dari transaksi sewa menyewa, sakin menyakin, gadai menggadai, atau melalui mekanisme lain misalnya meminjam atau menggarap lahan famili; dan (3) distribusi penguasaan maupun pemilikan lahan yang mencerminkan pemerataan atau ketimpangan penyebaran pemilikan dan penguasaan lahan.

Sumber dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Pada data Patanas tersebut desa contoh dibagi atas empat tipe desa (Irawan *et al.*, 2014), yaitu (1) desa beragroekosistem sawah berbasis komoditas utama padi yang meliputi 14 desa contoh; (2) desa beragroekosistem lahan kering berbasis komoditas utama palawija yang meliputi 8 desa contoh; (3) desa beragroekosistem lahan kering berbasis komoditas utama sayuran yang meliputi 4 desa contoh; dan (4) desa beragroekosistem lahan kering berbasis

komoditas utama perkebunan yang meliputi 8 desa contoh. Seluruh desa contoh dipilih di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Adapun jumlah rumah tangga contoh sekitar 30–40 rumah tangga per desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang, mencakup analisis frekuensi dan rata-rata. Regresi sederhana juga digunakan untuk mengetahui korelasi antarvariabel yang dianalisis. Analisis struktur penguasaan dan pemilihan lahan rumah tangga dilakukan dengan menghitung luas lahan garapan dan lahan milik rumah tangga menurut jenis lahan (lahan sawah, tegalan, kebun) dan status penguasaan lahan (milik, sewa, sakap, gadai). Analisis distribusi penguasaan dan pemilihan lahan rumah tangga dilakukan dengan menghitung indeks Gini penguasaan dan pemilihan lahan menurut jenis lahan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \text{Cov}(y_i, p(y_i))$$

- di mana: $G(y)$ = indeks Gini distribusi penguasaan/pemilikan lahan rumah tangga
 \bar{y} = rata-rata luas penguasaan/pemilikan lahan rumah tangga
 y_i = total penguasaan/pemilikan lahan rumah tangga ke- i
 $p(y_i)$ = urutan lahan rumah tangga, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga dengan luas penguasaan/pemilikan lahan terkecil dan $p = n$ untuk urutan rumah tangga dengan luas penguasaan/pemilikan lahan terluas
 n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi penguasaan lahan rumah tangga termasuk kategori ketimpangan berat apabila $G > 0,5$, kategori ketimpangan sedang apabila $0,4 < G < 0,5$, dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

PERUBAHAN STRUKTUR PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN LAHAN

Dibedakan menurut tipe lahan, penguasaan lahan rumah tangga pertanian terdiri dari lahan sawah, tegal, kebun, pekarangan (termasuk lahan untuk tempat tinggal). Tabel 1 menunjukkan sebaran lahan rumah tangga petani menurut tipe lahan di berbagai agroekosistem. Dinamika rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga secara agregat selama periode survei (perubahan survei tahun awal dan survei tahun akhir) bervariasi menurut tipe desa/agroekosistem (AE).

Pada agroekosistem lahan sawah berbasis komoditas padi, penguasaan lahan sawah meningkat, sementara untuk lahan kering palawija penguasaan lahan tegalan menurun, penguasaan lahan kering sayuran meningkat, dan penguasaan lahan kering perkebunan meningkat dengan kisaran perubahan terendah 0,03 ha (AE lahan sawah) dan tertinggi 0,41 ha (AE lahan kering perkebunan). Hal ini mengindikasikan ada pergeseran penguasaan lahan, di mana penguasaan lahan rumah tangga di AE sawah menurun, sebaliknya penguasaan lahan rumah tangga di

AE lahan kering perkebunan dan palawija meningkat. Jika ditelisik lebih lanjut menurut jenis/tipe lahan, peningkatan luas lahan terbesar adalah untuk lahan kebun, khususnya di AE lahan kering perkebunan, sebaliknya luas penguasaan lahan sawah dan lahan kering palawija cenderung menurun.

Tabel 1. Perubahan Luas Penguasaan dan Pemilikan Lahan Menurut Tipe Lahan pada Awal dan Akhir Periode Survei Patanas (ha)

Tipe Desa	Tipe Lahan	Penguasaan Lahan			Pemilikan Lahan		
		Tahun Awal	Tahun Akhir	Perubahan	Tahun Awal	Tahun Akhir	Perubahan
LS-Padi		2007	2010	2007–2010	2007	2010	2007–2010
	Sawah	0,90	0,93	0,03	0,59	0,68	0,09
	Tegal	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	Kebun	0,06	0,03	-0,03	0,06	0,03	-0,02
	Lainnya	0,08	0,04	-0,04	0,08	0,04	-0,04
	Total	1,06	1,02	-0,04	0,73	0,77	0,04
LK-Palawija		2008	2011	2008–2011	2008	2011	2008–2011
	Sawah	0,09	0,09	0,00	0,07	0,08	0,01
	Tegal	0,56	0,51	-0,05	0,39	0,43	0,04
	Kebun	0,21	0,29	0,08	0,19	0,28	0,09
	Lainnya	0,08	0,07	-0,01	0,06	0,06	0,01
	Total	0,94	0,96	0,02	0,71	0,85	0,14
LK-Sayuran		2008	2011	2008–2011	2008	2011	2008–2011
	Sawah	0,09	0,04	-0,06	0,05	0,03	-0,02
	Tegal	0,44	0,50	0,06	0,23	0,30	0,06
	Kebun	0,22	0,15	-0,07	0,18	0,15	-0,04
	Lainnya	0,02	0,01	-0,01	0,02	0,01	-0,01
	Total	0,78	0,70	-0,08	0,49	0,48	-0,01
LK-Perkebunan		2009	2012	2009–2012	2009	2012	2009–2012
	Sawah	0,36	0,32	-0,05	0,31	0,25	-0,06
	Tegal	0,31	0,26	-0,05	0,28	0,19	-0,09
	Kebun	1,50	1,92	0,41	1,45	1,74	0,28
	Lainnya	0,06	0,07	0,02	0,06	0,07	0,02
	Total	2,23	2,56	0,34	2,10	2,25	0,15

Fenomena berkurangnya lahan sawah dan tegal yang diikuti dengan meningkatnya luas penguasaan lahan kebun pada rumah tangga di AE lahan kering perkebunan konsisten dengan fenomena yang terjadi di tingkat lapang, yaitu banyak petani mengonversi lahan sawah dan kering yang semula ditanami padi dan palawija ke tanaman kelapa sawit. Hal ini didorong oleh alasan utama, yaitu insentif

harga atau pendapatan dari berkebun kelapa sawit jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari usaha tani padi, selain usaha tani kelapa sawit dipandang tidak memerlukan tenaga pemeliharaan yang intensif seperti halnya usaha tani padi. Mereka belajar dari pengalaman selama ini bahwa tanaman kelapa sawit jika sudah berumur produktif, petani tinggal memanen buahnya setiap dua minggu.

Dinamika kepemilikan lahan menunjukkan pola yang konsisten dengan dinamika penguasaan lahan, dalam artian menunjukkan arah perubahan yang seiring. Dinamika penguasaan lahan dapat disebabkan oleh adanya transaksi sewa menyewa, saku menyakup, gadai menggadai atau menggarap lahan saudara/keluarga/lahan pemerintah, dan sebagainya, sedangkan dinamika kepemilikan lahan disebabkan oleh transaksi jual beli lahan. Secara agregat, angka perubahan luas baik pada penguasaan maupun kepemilikan lahan selama periode tersebut masih tergolong moderat.

Dikaitkan dengan kecenderungan perubahan penguasaan lahan yang terjadi pada tingkat makro, data Sensus Pertanian 2003 (BPS, 2003) selama periode Sensus Pertanian 2003 ke Sensus Pertanian 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata luas penguasaan lahan sawah oleh rumah tangga usaha pertanian hampir dua kali lipat, yaitu dari 0,1 ha menjadi 0,2 ha. Peningkatan luas penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga usaha pertanian secara nasional selama dua periode sensus tersebut (10 tahun) perlu mendapat pencermatan, mengingat di satu sisi alih fungsi lahan pertanian selama periode yang sama meningkat secara substansial, yaitu alih fungsi lahan sawah ke lahan pertanian bukan sawah meningkat 51,58%, dan alih fungsi lahan sawah ke bukan pertanian sebesar 41,35% (BPS, 2013). Dengan pertumbuhan alih fungsi lahan pertanian yang tinggi tersebut di satu sisi dan di sisi lain rata-rata luas penguasaan lahan sawah oleh rumah tangga selama periode yang sama mengalami peningkatan, maka hal ini akan terjadi jika dibarengi dengan adanya penambahan luas lahan pertanian, baik melalui pencetakan sawah baru atau melalui reforma agraria.

Masih dari data yang bersumber dari BPS (2013), alih fungsi lahan bukan pertanian menjadi lahan sawah selama periode yang sama justru mengalami pertumbuhan yang berkurang sebesar 5%, yaitu hanya dari 112 ha turun menjadi 106 ha. Hal ini sangat tidak imbang jika dibandingkan dengan peningkatan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah sebesar 1.229 ha menjadi 1.863 ha (naik 51,58%). Dengan membandingkan besaran alih fungsi lahan sawah ke lahan bukan pertanian dan sebaliknya alih fungsi lahan bukan pertanian ke lahan sawah yang nilainya relatif sangat kecil dan justru mengalami penurunan, maka perlu dilakukan pendalaman informasi lebih lanjut terkait dengan metodologi perhitungan atau definisi rumah tangga usaha pertanian yang digunakan pada Sensus 2003 dengan Sensus 2013. Metodologi perhitungan atau definisi yang berbeda sudah barang tentu akan menghasilkan hasil hitungan yang berbeda sehingga kurang relevan membandingkan antarperiode sensus tersebut.

Dilihat dari luas penguasaan maupun kepemilikan lahan, rata-rata penguasaan lahan sawah rumah tangga pertanian di AE lahan sawah sebesar 0,90 ha, lebih luas dibandingkan dengan rata-rata luas penguasaan lahan sawah oleh rumah tangga usaha pertanian secara nasional sebesar 0,66 ha (BPS, 2013). Data pada Tabel 1

tersebut merupakan data agregat wilayah Jawa dan luar Jawa. Hal yang perlu mendapat catatan adalah bahwa rataan luas lahan pada analisis ini adalah rataan luas penguasaan lahan oleh rumah tangga yang menguasai lahan, bukan rataan terhadap total/agregat rumah tangga contoh (yang menguasai lahan maupun rumah tangga yang tidak menguasai lahan seperti buruh tani, nonpertanian, dan buruh nonpertanian).

Jika luas penguasaan lahan dipilah menurut perbedaan wilayah Jawa dan luar Jawa, terlihat bahwa di AE lahan sawah luas penguasaan lahan sawah di Jawa justru lebih luas dibandingkan luar Jawa (Tabel 2). Hal ini sedikit menyimpang dengan fenomena secara umum, di mana penguasaan lahan di luar Jawa secara umum masih lebih besar dibandingkan dengan di Jawa. Untuk AE lahan kering dengan komoditas basis palawija (Tabel 3), rataan luas lahan tegalan di luar Jawa lebih besar dari rataan penguasaan lahan di Jawa, sedangkan untuk AE lahan kering berbasis sayuran, penguasaan lahan tegalan di Jawa dan luar Jawa relatif sama (Tabel 4). Namun, untuk AE lahan kering perkebunan, rataan luas penguasaan lahan kebun di luar Jawa jauh lebih besar dibandingkan di Jawa (Tabel 5). Jika ditilik dari dinamika dua titik waktu, penguasaan lahan yang berstatus milik secara total cenderung meningkat. Jika data tersebut benar, maka hal ini menunjukkan dinamika yang "*better off*".

Tabel 2. Dinamika Luas Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Komoditas Padi di Jawa dan Luar Jawa, 2007–2010 (ha)

Jenis Lahan	Jawa			Luar Jawa		
	2007	2010	Perubahan	2007	2010	Perubahan
Milik						
- Sawah	0,64	0,71	0,06	0,45	0,63	0,17
- Tegalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
- Kebun	0,02	0,01	-0,01	0,16	0,10	-0,05
- Lainnya	0,07	0,04	-0,03	0,10	0,05	-0,05
- Total	0,74	0,75	0,02	0,71	0,80	0,10
Nonmilik						
- Sawah	0,28	0,26	-0,02	0,40	0,24	-0,15
- Tegalan	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
- Kebun	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
- Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total	0,30	0,26	-0,04	0,42	0,24	-0,17

Terkait dengan penguasaan lahan pada AE lahan sawah, dinamika dua titik waktu menunjukkan meskipun rataan penguasaan lahan sawah di Jawa sedikit lebih luas dibandingkan di luar Jawa, namun apabila dilihat dari rataan penguasaan lahan kebun, menunjukkan konsistensi di mana kontribusi rataan luas kebun lebih besar dibandingkan rataan penguasaan lahan kebun di Jawa, yang pada akhirnya berkontribusi pada rataan total luas secara keseluruhan penguasaan lahan rumah tangga di luar Jawa tetap lebih besar dibandingkan di Jawa. Hal ini terkait pula

dengan sampling penelitian Patanas yang mana dari 14 desa contoh yang diambil, 10 desa contoh adalah desa dominan padi di Jawa.

Tabel 3. Dinamika Luas Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Palawija di Jawa dan Luar Jawa, 2008–2011 (ha)

Jenis lahan	Jawa			Luar Jawa		
	2008	2011	Perubahan	2008	2011	Perubahan
Milik						
- Sawah	0,08	0,10	0,02	0,01	0,02	0,01
- Tegall	0,29	0,28	-0,01	0,77	0,90	0,13
- Kebun	0,02	0,19	0,17	0,78	0,75	-0,02
- Lainnya	0,04	0,04	0,00	0,11	0,10	-0,01
- Total	0,43	0,62	0,19	1,67	1,78	0,11
Nonmilik						
- Sawah	0,02	0,02	-0,01	0,02	0,00	-0,02
- Tegall	0,21	0,09	-0,12	0,05	0,06	0,01
- Kebun	0,00	0,01	0,01	0,08	0,02	-0,06
- Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	-0,07
- Total	0,24	0,12	-0,12	0,25	0,11	-0,15

Tabel 4. Dinamika Luas Pemilikan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Sayuran di Jawa dan Luar Jawa, 2008–2011 (ha)

Jenis lahan	Jawa			Luar Jawa		
	2007	2010	Perubahan	2007	2010	Perubahan
Milik						
- Sawah	0,07	0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
- Tegall	0,24	0,30	0,07	0,23	0,27	0,04
- Kebun	0,01	0,02	0,01	0,76	0,55	-0,20
- Lainnya	0,02	0,00	-0,02	0,02	0,02	0,00
- Total	0,32	0,36	0,03	1,01	0,84	-0,17
Nonmilik						
- Sawah	0,06	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00
- Tegall	0,25	0,28	0,03	0,07	0,01	-0,06
- Kebun	0,04	0,00	-0,04	0,02	0,03	0,01
- Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total	0,35	0,29	-0,06	0,09	0,04	-0,05

Secara umum hasil analisis dari dinamika penguasaan lahan kering berbasis palawija dan sayuran tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu rataan penguasaan lahan kering oleh rumah tangga di luar Jawa relatif lebih luas dibandingkan di Jawa, sebaliknya rataan luas sawah di Jawa masih relatif lebih luar dibandingkan luar Jawa. Hal ini diduga merupakan konsekuensi logis dari sejarah program-program pembangunan infrastruktur Jawa vs luar Jawa yang tidak merata,

yang lebih dipusatkan di Jawa sebagai pusat pemerintahan RI, bahkan sebagai pusat pemerintahan beberapa kerajaan sebelum masa kemerdekaan, yang sebagian besar ada di Jawa. Untuk penguasaan lahan nonmilik, dari ketiga AE tidak menunjukkan pola yang konsisten apakah rata-rata di Jawa lebih luas dibandingkan di luar Jawa atau sebaliknya.

Tabel 5. Dinamika Luas Pemilikan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Perkebunan di Jawa dan Luar Jawa, 2009–2012 (ha)

Jenis Lahan	Jawa			Luar Jawa		
	2009	2012	Perubahan	2009	2012	Perubahan
Milik						
- Sawah	0,12	0,13	0,00	0,33	0,27	-0,06
- Tegal	0,39	0,37	-0,02	0,26	0,15	-0,11
- Kebun	0,01	0,16	0,15	1,96	2,20	0,24
- Lainnya	0,00	0,02	0,02	0,07	0,09	0,01
- Total	0,53	0,68	0,16	2,62	2,71	0,09
Nonmilik						
- Sawah	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07	0,02
- Tegal	0,08	0,23	0,15	0,01	0,02	0,01
- Kebun	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	0,15
- Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total	0,09	0,25	0,16	0,13	0,32	0,18

PERUBAHAN STATUS PENGUSAHAAN LAHAN MENURUT TRANSAKSI LAHAN

Perubahan atau dinamika penguasaan lahan yang bukan milik dapat terjadi karena proses sewa menyewa, sakah menyakap, gadai menggadai, menggarap lahan pemerintah/negara, pinjam lahan saudara atau kerabat, dan lain sebagainya. Tabel 6 hingga Tabel 11 menyajikan rata-rata perubahan luas lahan menurut status penguasaan lahan per rumah tangga yang melakukan transaksi. Pada AE lahan sawah, sebagian besar status petani terhadap lahan garapan nonmilik yang dominan sesuai AE (lahan sawah) adalah menyakap, yaitu rata-rata 0,75 ha, diikuti oleh menyewa 57 ha, menggadai 0,35, dan lainnya 0,27 ha dengan angka yang cenderung meningkat (Tabel 6). Pada AE lahan kering/tegalan komoditas basis palawija, status lahan nonmilik yang dominan adalah menyakap, yang luas lahannya meningkat signifikan, yaitu dari 0,25 ha menjadi 0,99 ha (Tabel 7). Status lahan bukan milik lainnya adalah menyewa, dan cenderung meningkat.

Kecenderungan peningkatan garapan bukan milik baik yang berasal dari sewa, sakah, gadai bukan tidak memiliki konsekuensi terhadap tingkat produktivitas tanaman dibandingkan dengan produktivitas tanaman yang berasal dari garapan lahan milik sendiri. Hasil kajian Siagian (2013) menunjukkan bahwa produksi pada lahan garapan milik sendiri berbeda secara nyata dengan lahan garapan nonmilik.

Pada AE lahan kering perkebunan berbasis komoditas tebu (Tabel 8), hanya ada transaksi menyewa di lahan kering perkebunan dan terjadi hanya pada tahun 2012 sebesar 0,08 ha, selebihnya adalah lahan milik petani sendiri. Relatif jarang transaksi pada penguasaan lahan pada AE lahan perkebunan berbasis komoditas tebu karena secara umum rata-rata luas penguasaan lahan kering untuk tebu relatif kecil dan hanya cukup untuk dikerjakan sendiri dan lahan tersebut merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Menyewakan lahan untuk tanaman tebu artinya penyewa harus siap melepaskan lahannya (tidak menggarap lahan) paling tidak satu musim tanam tebu (sekitar 12 bulan). Walaupun ada yang menyewakan lahan, hal itu karena didorong oleh kebutuhan mendesak.

Tabel 6. Perubahan Luas Lahan Menurut Status Penguasaan Lahan di Agroekosistem Lahan Sawah, 2007–2010 (ha)

Status	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Milik sendiri	0,43	0,70	0,11	0,36	0,33	0,51	0,08	0,10	0,29	0,52
Nonmilik										
- Menyewa	0,37	0,57	0,39	0,46	1,40	-	-	0,20	0,38	0,56
- Menyakup	0,51	0,75	2,50	-	-	0,30	-	-	0,54	0,74
- Menggadai	0,61	0,35	-	-	-	-	-	-	0,61	0,35
- Lainnya	0,42	0,27	0,29	-	-	-	0,05	-	0,35	0,27
Total	0,44	0,68	0,38	0,38	0,35	0,51	0,08	0,10	0,33	0,54

Tabel 7. Perubahan Status Penguasaan Lahan Menurut Transaksi Lahan di Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Palawija, 2008–2011 (ha)

Status lahan	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Milik sendiri	0,18	0,22	0,33	0,38	0,47	0,25	0,05	0,04	0,23	0,31
Menyewa	0,21	0,17	0,38	0,39	-	0,71	0,02	0,00	0,33	0,37
Menyakup	0,14	-	0,25	0,99	1,00	-	-	0,00	0,31	0,99
Gadai	0,15	-	0,29	-	-	-	-	-	0,23	-
Lainnya	0,28	0,19	0,32	0,28	0,28	-	0,05	0,00	0,27	0,27
Total	0,19	0,17	0,33	0,42	0,45	0,71	0,05	0,00	0,24	0,39

Hal yang agak berbeda untuk lahan kering perkebunan berbasis komoditas karet (lokasi di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi), status lahan bukan milik adalah menyewa dan menyakup, dengan besaran masing-masing 2,05 ha dan 2,15 ha di mana status lahan tersebut pada survei sebelumnya tidak dijumpai (Tabel 9). Pada transaksi menyewa, pemilik lahan sudah kehilangan hak garapnya selama periode tertentu yang disepakati (misalnya satu tahun atau dua tahun). Pada umumnya alasan menyewakan lahan kebun adalah untuk keperluan nonproduktif

yang memerlukan biaya besar (misalnya naik haji, atau biaya kuliah anak) atau untuk investasi pada lahan kebun lainnya (membuka kebun baru dengan komoditas lain, utamanya kelapa sawit).

Tabel 8. Perubahan Status Penguasaan Lahan Menurut Transaksi Lahan di Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Perkebunan Tebu, 2009–2012 (ha)

Status Lahan	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Milik sendiri	0,34	0,38	0,45	0,48	0,17	0,939	0,08	0,08	0,49	0,54
Nonmilik										
- Menyakap	0,15	0,17	1,13	0,60	-	-	-	-	0,64	0,42
- Menyewa	0,20	0,23	0,55	1,37	-	0,08	-	-	0,48	0,98
- Lainnya	-	0,10	-	1,00	-	-	0,02	-	0,02	0,55

Tabel 9. Perubahan Status Penguasaan Lahan Menurut Transaksi Lahan di Agroekosistem Lahan Kering berbasis Komoditas Perkebunan Karet, 2009–2012 (ha)

Status Lahan	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Milik sendiri	1,10	0,94	1,75	-	2,67	2,90	-	0,14	3,11	2,47
Nonmilik										
- Menyakap	-	0,70	-	-	-	2,15	-	-	-	1,93
- Menyewa	-	-	-	-	-	2,04	-	-	-	2,04
- Lainnya	-	0,67	-	-	-	0,48	-	-	-	0,56

Jenis transaksi lainnya adalah menyakap. Transaksi menyakap lebih sering dilakukan dibandingkan menyewa. Penyakap pada umumnya pemilik kebun yang lahannya luas sehingga tidak mampu menggarap sendiri. Periode sakap tergantung kesepakatan, biasanya tidak hanya setahun atau dua tahun, namun umumnya sudah bersifat langganan. Pada transaksi menyakap, pemilik kebun menyerahkan garapannya untuk dipelihara ke orang lain dan masih membiayai biaya pemeliharaan (pupuk, insektisida, herbisida, dan obat penggumpal lateks). Hasil sadapan dibagi dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Namun, dalam dua tahun terakhir perkembangan menunjukkan bahwa transaksi menggarap lahan orang lain semakin berkurang, dalam artian semakin sulit orang yang tidak memiliki lahan untuk mencari lahan garapan orang lain. Hal ini agak kontradiktif karena pada umumnya di saat ekonomi karet membaik (harga bagus), maka nilai lahan (*land rent*) akan semakin tinggi yang mendorong orang untuk menyakap lebih banyak, sebaliknya pemilik lahan lebih suka menggarap lahannya sendiri. Namun, yang terjadi saat ini adalah harga karet sedang jatuh sehingga usaha tani karet kurang menguntungkan, di mana kondisi seperti ini semestinya akan mendorong pemilik lahan memilih untuk menyerahkan lahan garapannya ke orang lain, sehingga transaksi lahan akan meningkat. Namun, yang

terjadi adalah petani yang akan mencari lahan garapan semakin sulit lahan garapan semakin terbatas, lahan sudah diwariskan kepada anak-anak mereka yang membentuk rumah tangga baru, atau ada di antaranya yang telah mengonversi lahan karet ke komoditas kelapa sawit karena usaha tani kelapa sawit dirasa lebih menguntungkan. Hasil kajian Nuhung (2015) menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi atau memotivasi petani terhadap transaksi lahan (dalam hal ini menjual lahan) adalah kebutuhan mendesak, seperti perkawinan, membiayai kuliah/sekolah anak, dan bisnis lahan.

Pada lahan kering perkebunan berbasis komoditas kakao (Tabel 10) transaksi penguasaan lahan yang sering terjadi adalah menyakap, menyewa, dan menggadai. Seperti uraian sebelumnya, untuk lahan yang disakapkan, petani pemilik lahan masih memperoleh hasil panen dan menanggung biaya pemeliharaan. Umumnya periode waktu untuk transaksi menyakap relatif lama (lebih dari satu tahun) dan umumnya pelakunya adalah kerabat atau orang yang sudah dikenal baik (langganan). Transaksi lainnya adalah menggadai, umumnya transaksi ini terjadi saat pemilik kebun memerlukan uang secara mendesak, dan periode gadai tergantung kesepakatan atau sesuai dengan kemampuan pemilik kebun untuk mengembalikan uang gadaian. Pada umumnya kebun yang digadaikan adalah kebun yang sudah menghasilkan sehingga petani penggadai dapat memanen hasil kebunnya sampai saatnya uang gadaian dikembalikan. Sebagai informasi tambahan, status ekonomi usaha tani kakao di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan kurang berkembang dan tidak dapat dijadikan gantungan nafkah rumah tangga. Hal ini disebabkan lokasi kebun yang relatif jauh dari pemukiman (di perbukitan) sehingga pemeliharaan tanaman kurang dilakukan atau nyaris tidak dipelihara sehingga mengakibatkan lebih lanjut produktivitas relatif rendah. Dengan demikian, hasil kebun kakao tidak dapat dijadikan sebagai gantungan sumber pendapatan. Kondisi yang lebih baik ditemui di Kabupaten Luwu, di mana akses ke kebun lebih baik sehingga pemeliharaan tanaman lebih baik pula dan kakao dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

Tabel 10. Perubahan Status Penguasaan Lahan Menurut Transaksi Lahan di Agroekosistem Lahan Kering berbasis Komoditas Perkebunan Kakao, 2009–2012 (ha)

Status Lahan	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Milik sendiri	0,60	0,58	0,54	0,45	0,83	0,79	0,13	0,04	1,10	0,82
Nonmilik										
- Menyakap	0,50	0,49	-	0,30	1,00	0,73	-	-	0,62	0,53
- Menyewa	0,40	0,37	-	-	-	-	-	-	0,40	0,37
- Menggadai	0,57	0,28	-	-	-	0,70	-	-	0,57	0,39
- Lainnya	0,80	0,50	0,44	0,3	-	0,14	-	-	0,54	0,31

Pada AE lahan kering perkebunan berbasis komoditas kelapa sawit (Tabel 11), transaksi penguasaan lahan relatif jarang terjadi, sebagian besar lahan digarap sendiri. Kalaupun ada transaksi penguasaan lahan, umumnya pemiliknya adalah

orang luar desa sehingga penggarapan lahan diserahkan kepada petani setempat dengan jenis transaksi bagi hasil (menyakap). Di antara komoditas perkebunan yang menjadi fokus bahasan pada kajian ini, status ekonomi komoditas kelapa sawit sedang naik daun. Pendapatan dari usaha tani kelapa sawit jauh lebih menguntungkan dari usaha tani karet dan kakao. Kebun kelapa sawit menjadi sangat berharga dan satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga yang bisa diharapkan. Dengan kondisi tersebut, lahan perkebunan jarang digarapkan kepada orang lain, kecuali bagi pemilik kebun dari luar kota. Pemilik kebun yang berlokasi di luar kota banyak dijumpai di desa contoh karena pada saat pembukaan lahan pertama kali sebagai lahan PIR, lahan tersebut merupakan lahan warisan dari leluhur mereka yang sebelumnya tinggal di sekitar desa contoh.

Tabel 11. Perubahan Status Penguasaan Lahan Menurut Transaksi Lahan di Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, 2009–2012 (ha)

Status Lahan	Sawah		Tegal		Kebun		Pekarangan		Total	
	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012	2009	2012
Milik sendiri	0,79	0,59	0,93	1,32	2,47	3,01	0,30	0,40	2,79	3,24
Nonmilik										
- Menyakap	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	1,10
- Menyewa	1,00	-	0,50	0,75	1,17	-	-	-	1,00	0,75
- Lainnya	-	-	0,75	0,83	1,67	2,00	-	0,05	1,30	0,91

DISTRIBUSI PENGUSAHAAN LAHAN

Masalah ketimpangan lahan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian secara serius. Beberapa keributan terkait dengan lahan lebih banyak disebabkan oleh masalah ketimpangan lahan. Tabel 12 menyajikan rangkuman kondisi distribusi penguasaan dan kepemilikan lahan di tingkat rumah tangga pada berbagai agroekosistem dengan menggunakan indeks Gini sebagai indikator ketimpangan. Pada tabel tersebut dapat ditunjukkan secara umum tingkat ketimpangan penguasaan pada berbagai tipe agroekosistem berada pada tingkat ketimpangan sedang sampai timpang (ketimpangan berat), kecuali pada AE lahan kering komoditas basis perkebunan karet berada pada ketimpangan ringan. Jika ditinjau dari dinamika yang terjadi, selama periode survei panel, tingkat ketimpangan di AE lahan sawah, lahan kering palawija, dan lahan kering sayuran cenderung meningkat meski masih pada batas ketimpangan sedang. Sementara itu, ketimpangan pada kepemilikan lahan sawah cenderung menurun dan ketimpangan pada kepemilikan lahan kering sayuran relatif tetap, namun sebetulnya sudah berada pada tingkat timpang. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas transaksi lahan nonmilik cukup tinggi sehingga mengakibatkan kesenjangan penguasaan lahan meningkat. Tabel 6 mendukung tesis tersebut di mana transaksi lahan pada AE lahan sawah terjadi baik melalui sakap, menyewa, gadai, dan lainnya.

Distribusi lahan di AE lahan kering tebu juga cenderung semakin timpang pada akhir periode survei, mencapai angka 0,69 untuk penguasaan dan 0,59 untuk

pemilikan lahan, yang berarti pada tingkat ketimpangan berat. Pemilikan lahan yang relatif kecil-kecil di satu sisi, namun di sisi lain sebagian rumah tangga petani memiliki lahan yang relatif luas sehingga menjadikan kesenjangan yang cukup lebar terhadap penguasaan maupun pemilikan lahan. Untuk AE lahan kering perkebunan komoditas karet, kakao, dan kelapa sawit, distribusi lahan cenderung lebih baik yang ditunjukkan melalui indeks Gini yang mengecil serta ketimpangan yang berada pada tingkat ketimpangan sedang. Kondisi ketimpangan distribusi lahan yang berada pada tingkat sedang sampai berat (sangat timpang) ini cukup memprihatinkan karena ketimpangan lahan terkait dengan dengan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik. Sebetulnya Pemerintah selalu menempatkan perbaikan distribusi lahan sebagai salah satu prioritas programnya, termasuk alokasi anggarannya untuk audit lahan dan sertifikasi serta pencetakan lahan baru setiap tahunnya (Haryono, 2013). Upaya tersebut masih terus harus dilakukan untuk dapat mengondisikan luasan usaha tani yang mampu menyejahterakan rumah tangga petani.

Tabel 12. Perubahan Indeks Gini Penguasaan dan Pemilikan Lahan di Berbagai Agroekosistem pada Awal dan Akhir Periode Survei Patanas

Tipe Desa (AE)	Penguasaan		Pemilikan	
	Awal	Akhir	Awal	Akhir
Padi	0,40	0,42	0,51	0,47
Palawija	0,43	0,49	0,51	0,53
Sayuran	0,49	0,50	0,53	0,53
Tebu	0,44	0,63	0,42	0,59
Karet	0,58	0,33	0,58	0,39
Kakao	0,49	0,41	0,53	0,44
Kelapa sawit	0,49	0,40	0,51	0,40

Distribusi berdasarkan kelas luas lahan pada AE lahan sawah (Tabel 13) didominasi penguasaan lahan rumah tangga berada pada kelas luas lahan 0,51–1,00 ha, yaitu sebanyak 29,4% pada tahun 2007 menjadi 26,5% pada tahun 2010 berada pada kelas luas lahan tersebut, dan pada kelas lahan 0,26–0,50 ha frekuensi rumah tangga sebanyak 17,7% tahun 2007 dan meningkat menjadi 26,2% pada tahun 2010. Rataan luas penguasaan lahan terkonsentrasi pada tingkat rata-rata 0,73 ha tahun 2007, meningkat menjadi 0,76 ha pada tahun 2010. Sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa rata-rata luas penguasaan lahan tersebut dihitung terhadap rumah tangga yang hanya menguasai lahan, bukan rata-rata terhadap agregat jumlah rumah tangga di desa. Dari Tabel 14 tersebut menunjukkan juga bahwa persentase petani gurem ($\leq 0,5$ ha), sementara persentase petani lahan luas menurun dan rata-rata luas penguasaan lahan juga sedikit menurun.

Pada AE lahan kering berbasis komoditas palawija (Tabel 14), rumah tangga petani pada tahun 2008 terkonsentrasi pada kelas luas lahan $< 0,25$ ha, yaitu sebesar 29,9%, namun pada survei panel berikutnya didominasi rumah tangga

bergeser pada kelas luas lahan 0,26–0,50% sebesar 37,0%. Sebaliknya, petani yang tergolong kelas lahan luas (>2 ha) justru mengalami pengurangan.

Pada AE lahan kering perkebunan komoditas basis tebu (Tabel 15), distribusi rumah tangga petani mengalami pergeseran selama periode 2008–2011, di mana pada tahun 2009 petani terkonsentrasi pada kelas petani gurem <0,25 ha, namun pada tahun 2012 konsentrasi berada pada kelas luas lahan 0,26–0,50 ha. Artinya beberapa petani yang semula berlahan <0,25 ha menambah luas garapannya. Sekitar 86% rumah tangga petani berada pada kelas penguasaan lahan <1,00 ha pada tahun 2008, dan pada tahun 2012 berkurang menjadi 77% berada pada kelas yang sama. Sementara itu, penguasaan lahan >1,00 ha pada tahun 2009 sebesar 13,9%, pada tahun 2012 menjadi 22,2%. Dengan batasan kelas penguasaan lahan 1,00 ha tersebut, distribusi rumah tangga petani pada AE lahan kering perkebunan dapat disebut mengalami peningkatan dalam penguasaan lahan, atau dengan kata lain rumah tangga petani gurem berkurang, sementara rumah tangga pada golongan lahan luas meningkat.

Tabel 13. Distribusi Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Sawah, 2007–2010

Kelas Luas Lahan	2007		2010	
	Frekuensi (%)	Rataan (ha)	Frekuensi (%)	Rataan (ha)
< 0,25	13,14	0,18	12,36	0,17
0,26–0,50	17,71	0,37	25,57	0,37
0,51–1,00	29,43	0,73	26,15	0,76
1,01–1,25	12,86	1,12	10,63	1,12
1,26–1,50	6,29	1,39	6,32	1,41
1,51–2,00	8,00	1,70	9,20	1,79
> 2	12,57	3,08	9,77	3,43
Total	100,00	1,06	100,00	1,02

Tabel 14. Distribusi Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Palawija, 2008–2011

Kelas Luas Lahan	2008		2011	
	Frekuensi (%)	Rataan (ha)	Frekuensi (%)	Rataan (ha)
< 0,25	29,9	0,09	22,8	0,17
0,26–0,50	20,7	0,36	37,0	0,37
0,51–1,00	24,9	0,71	25,0	0,71
1,01–1,25	7,0	1,10	5,4	1,12
1,26–1,50	3,1	1,40	6,5	1,41
1,51–2,00	5,6	1,70	1,1	1,58
> 2	8,9	3,13	2,2	2,44
Total	100	0,77	100,0	0,58

Tabel 15. Perubahan Distribusi Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Tebu, 2009–2012

Kelas Luas Lahan	2009		2012	
	Frekuensi (%)	Rataan (ha)	Frekuensi (%)	Rataan (ha)
< 0,25	33,3	0,20	11,1	0,15
0,26–0,50	28,1	0,38	44,4	0,43
0,51–1,00	24,6	0,68	22,2	0,89
1,01–1,25	1,8	1,03	7,4	1,16
1,26–1,50	7,0	1,36	14,8	1,43
1,51–2,00	-	-	-	-
> 2	5,3	2,70	-	-
Total	100,0	0,60	100,0	0,70

Untuk AE lahan kering perkebunan komoditas utama karet (Tabel 16), sebanyak 69% rumah tangga petani contoh memiliki lahan >2,0 ha pada tahun 2009 dan tahun 2012 angkanya berkurang menjadi 54,5% namun tetap merupakan angka tertinggi. Petani dengan luas lahan kurang dari 1 ha hanya sekitar 9,1%. Distribusi tersebut sesuai dengan fenomena bahwa petani pekebun secara umum memiliki lahan lebih luas dari petani tanaman pangan.

Tabel 16. Distribusi Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Karet, 2009–2012

Kelas Luas Lahan	2009		2012	
	Frekuensi (%)	Rataan (ha)	Frekuensi (%)	Rataan (ha)
< 0,25	2,3	0,22	0,0	-
0,26– 0,50	3,1	0,50	3,0	0,50
0,51–1,00	3,8	0,98	6,1	0,95
1,01– 1,25	1,5	1,18	12,1	1,03
1,26– 1,50	5,4	1,47	12,1	1,44
1,51– 2,00	14,6	2,00	12,1	1,90
> 2	69,2	4,18	54,5	3,22
Total	100,0	0,22	100,0	2,36

Fenomena distribusi penguasaan lahan pada komoditas kakao berbeda dengan komoditas karet, meski sama-sama komoditas perkebunan. Pada komoditas kakao rumah tangga petani terkonsentrasi pada kelas luas penguasaan lahan <1,0 ha (Tabel 17). Agak mengherankan untuk komoditas perkebunan kakao, sebagian besar petani pada kenyataannya tergolong petani kecil. Dinamika dua titik waktu menunjukkan persentase petani berlahan <1,0 ha semakin bertambah, dan terkonsentrasi pada kelas luas lahan 0,51–1,00 ha, sementara persentase petani berlahan >1,00 ha semakin berkurang. Dengan kata lain, telah terjadi marginalisasi petani dari sudut penguasaan lahan perkebunan. Dengan lahan kebun kurang dari 1,00 ha dan produktivitas yang relatif rendah, maka aspek kesejahteraan petani

masih menjadi tanda tanya, sementara kesempatan kerja nonpertanian di desa relatif sangat terbatas. Alternatif yang ditempuh adalah melakukan migrasi ke luar negeri menjadi TKI sebagai buruh tebang di Malaysia, buruh angkut, dan sebagainya untuk tenaga kerja muda, sedangkan tenaga kerja berumur tua dapat dikatakan sangat kurang produktif. Bagi rumah tangga petani yang memiliki lahan sawah atau lahan kering palawija, aktivitas usaha tani pada lahan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Tabel 17. Perubahan Distribusi Penguasaan Lahan pada Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Kakao, 2009–2012

Kelas Luas Lahan	2009		2012	
	Frekuensi (%)	Rataan (ha)	Frekuensi (%)	Rataan (ha)
< 0,25	5,3	0,10	0,0	-
0,26– 0,50	26,3	0,44	13,5	0,46
0,51–1,00	17,1	0,81	45,9	0,77
1,01– 1,25	2,6	1,12	21,6	1,15
1,26– 1,50	19,7	1,43	10,8	1,40
1,51– 2,00	10,5	1,87	5,4	1,80
> 2	18,4	3,64	2,7	2,50
Total	100,0	1,44	100,0	0,98

HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN RUMAH TANGGA DENGAN LUAS PENGUSAHAAN LAHAN

Sumber pendapatan rumah tangga dewasa ini bukan hanya dari sektor pertanian, melainkan juga dari usaha nonpertanian, buruh tani maupun buruh nontani. Di sektor pertanian sendiri, pendapatan rumah tangga secara teori akan ditentukan oleh luas penguasaan lahan baik lahan milik maupun nonmilik. Kontribusi lahan nonmilik dalam memengaruhi besar kecilnya pendapatan rumah tangga ditentukan oleh luasan lahan yang dikelola. Semakin erat hubungan antara pendapatan pertanian dengan luas lahan milik, maka dapat dikatakan kontribusi lahan terhadap pendapatan semakin besar. Demikian pula halnya hubungan antara pendapatan dengan luas lahan yang berasal dari menyakap, menyewa, menggadai dan sebagainya. Tabel 18 menunjukkan koefisien korelasi antara pendapatan rumah tangga di sektor pertanian dengan luas penguasaan lahan milik dan nonmilik.

Dari korelasi antara pendapatan pertanian dari berbagai agroekosistem dengan luas lahan milik dan lahan nonmilik, maka dapat ditunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan pertanian dengan luas lahan nonmilik pada agroekosistem lahan kering perkebunan berbasis komoditas tebu memiliki koefisien korelasi tertinggi. Dinamika dua titik waktu menunjukkan hasil yang senada. Semakin luas penguasaan lahan nonmilik semakin besar pendapatan rumah tangga yang berasal dari sektor pertanian. Selanjutnya, penguasaan lahan milik dan nonmilik pada

agroekosistem lahan kering perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan pendapatan rumah tangga di sektor pertanian.

Tabel 18. Korelasi antara Pendapatan Rumah Tangga di Sektor Pertanian dengan Luas Lahan Garapan Milik dan Garapan Nonmilik di Lahan Kering Perkebunan, 2009 dan 2012

Pendapatan Pertanian	Luas Lahan Milik		Luas Lahan Sewa/Sakap	
	2009	2012	2009	2012
AE LK perkebunan tebu	0,55	0,54	0,89	0,93
AE LK perkebunan karet	0,29	0,22	0,00	0,49
AE LK perkebunan kakao	0,44	0,27	0,47	0,36
AE LK perkebunan kelapa sawit	0,62	0,46	0,56	0,73

KESIMPULAN

Luas penguasaan lahan petani di agroekosistem sawah dan lahan kering berbasis sayuran menurun, sebaliknya luas penguasaan lahan di agroekosistem lahan kering perkebunan dan palawija meningkat. Peningkatan luas lahan terbesar adalah untuk lahan kebun di lahan kering perkebunan, yang merupakan salah satu bukti fenomena banyaknya alih fungsi lahan sawah dan tegal yang semula ditanam padi dan palawija beralih ke kelapa sawit. Secara agregat luas penguasaan maupun pemilikan lahan cenderung meningkat (kecuali pada lahan sawah dan lahan kering sayuran), yang menunjukkan dinamika yang "*better off*".

Penguasaan lahan sawah oleh petani di Jawa lebih luas dibandingkan di luar Jawa sedangkan penguasaan lahan kebun oleh petani di luar Jawa jauh lebih luas dibandingkan di Jawa. Transaksi penguasaan lahan yang banyak berkembang di agroekosistem sawah dan lahan kering palawija adalah sewa, sakap, dan gadai, sedangkan untuk lahan kering perkebunan jenis transaksi yang dominan adalah sakap dan gadai. Terdapat hubungan yang erat antara pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian dengan luas penguasaan lahan nonmilik di agroekosistem lahan kering perkebunan tebu dan kelapa sawit, yang mengindikasikan tingginya kontribusi lahan nonmilik dalam membentuk pendapatan rumah tangga perkebunan.

Tingkat ketimpangan penguasaan lahan sawah, lahan kering palawija, dan lahan kering sayuran cenderung meningkat meski masih pada batas ketimpangan sedang, sementara ketimpangan pada pemilikan lahan sawah cenderung menurun dan ketimpangan pada pemilikan lahan kering sayuran relatif tetap, namun sebetulnya sudah berada pada tingkat timpang. Distribusi lahan kering perkebunan tebu yang sudah berstatus sangat timpang cenderung semakin timpang. Distribusi rumah tangga pada lahan sawah terkonsentrasi pada golongan luas lahan 0,51–1,00 ha, lahan kering palawija dan sayuran pada 0,26–1,50, dan lahan kering perkebunan di atas 2,0 ha, kecuali untuk tebu pada 0,25–0,50. Dinamika penguasaan lahan pada agroekosistem lahan kering palawija dan sayuran serta lahan kering perkebunan tebu, menunjukkan distribusi rumah tangga cenderung

bergeser ke golongan luas yang lebih besar, atau menunjukkan perubahan yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan tingginya laju alih fungsi lahan sawah untuk keperluan nonpertanian yang berimplikasi pada penguasaan lahan pertanian yang semakin berkurang, maka strategi perluasan lahan pertanian ke depan adalah melalui pemanfaatan lahan suboptimal. Upaya lain untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian adalah dengan mendorong implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada kondisi penguasaan lahan yang sempit dan cenderung menyempit, upaya lain yang juga perlu mendapat prioritas adalah mengupayakan konsolidasi lahan, yang secara prinsip adalah menata agar lahan dapat digunakan secara lebih efisien, menghindari fragmentasi lahan dari sistem pewarisan, dan melakukan usaha tani secara berkelompok pada areal satu hamparan sehingga meningkatkan efisiensi usaha tani. Program *land reform* juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian dalam kondisi menyempitnya penguasaan lahan oleh rumah tangga petani di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Haryono. 2013. Inovasi Teknologi Pertanian dalam Pemanfaatan Lahan Terlantar. hlm. 60–72. *Dalam* D.K.S. Swastika, K. Suradisastra, dan B. Hutabarat (Eds.). Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Lahan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Irawan, B., I.W. Rusastra, Hermanto, T. Pranadji, G.S. Hardono, T.B. Purwantini, dan E. Ariningsih. 2014. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data Patanas. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Nuhung, I.A. 2015. Faktor-Faktor yang Memotivasi Petani Menjual Lahan dan Dampaknya di Daerah Suburban. *Jurnal Agro Ekonomi* 33(1):17–33.
- Purwoto, A., I.W. Rusastra, B. Winarso, T.B. Purwantini, A.K. Zakaria, T. Nurasa, D. Hidayat, C. Muslim, dan C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachmat, M. dan C. Muslim. 2013. Peran dan Tantangan Implementasi UU 41/2009 dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Dalam* Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3I. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Siagian, V. 2013. Status Penguasaan Lahan dan Hubungannya dengan Produksi Padi di Provinsi Banten. hlm. 269–279. *Dalam* D.K.S. Swastika, K. Suradisastra, B. Hutabarat (Eds.). Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Lahan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Sudaryanto, T., S.H. Susilowati, dan Sumaryanto. 2009. Increasing Number of Small Farms in Indonesia: Causes and Consequences. 111 EAAE-IAAE Seminar 'Small Farms: Decline or Persistence'. University of Kent. Canterbury, UK.
- Suherman, A. dan U. Suratno. 2014. Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi. hlm.231-259. *Dalam* Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Salim, dan A. Hendriadi (Eds). Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. IAARD Press. Jakarta.
- Susilowati, S.H., P.U. Hadi, Sugiarto, Supriyati, W.K. Sejati, Supadi, A.K. Zakaria, T.B.Purwantini, D. Hidayat, dan M. Maulana. 2009. Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Susilowati, S.H, B. Hutabarat, M. Rachmat, H. Supriyadi, A.K. Zakaria, Sugiarto, Supriyati, Supadi, B. Winarso, M. Iqbal, A. Purwoto, R. Elizabeth, T.B. Purwantini, D. Hidayat, C. Muslim, T. Nurasa, M. Maulana, dan R. Aldilah. 2010. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Susilowati, S.H., T.B. Purwantini, Supriyati, W.K. Sejati, D. Hidayat, M. Maulana, A.M. Ar-Rozi, dan R.D. Yofa. 2012. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Swastika, D.K.S. 2014. Reformasi Paradigma Urbanisasi: Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan. hlm. 357-585. *Dalam* Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Salim, dan A. Hendriadi (Eds). Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. IAARD Press. Jakarta.